

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi antara lain bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka panjang. Demikian juga halnya pembangunan ekonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara, juga bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Salah satu cara meningkatkan PDRB adalah dengan melakukan restrukturisasi sektor keuangan khususnya dibidang perbankan. Fokus utama dari pengembangan sistem keuangan, khususnya sistem perbankan, adalah peningkatan pembiayaan eksternal atau kredit perbankan terhadap bisnis atau sektor riil. Beberapa hasil penelitian juga telah membuktikan bahwa pengembangan sistem keuangan berhubungan erat dengan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997; Beck et. al. 2001 dan Wachtel, 2001).

Berbagai model teoritis di atas menekankan konsentrasi pasar kredit dalam sistem perbankan berasosiasi dengan investasi berisiko tinggi dan investasi jangka panjang dalam industri-industri yang sudah dewasa. Pada tahap pembangunan ekonomi, konsentrasi pemberian kredit perbankan akan selalu memilih industri yang lebih ekonomis. Levine and Zervos (1998) menjelaskan bahwa pemberian kredit perbankan sangat berperan dalam penentuan tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Beck, Levine and Loayza (2000) telah membuktikan dampak positif dari pembiayaan kredit sistem perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor lain penentu tingkat investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat bunga kredit perbankan (Klein, 1971).

Beberapa hasil studi juga telah membuktikan bahwa peningkatan intensitas pasar modal diikuti oleh peningkatan intensitas pasar kredit yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaan eksternal bagi industri (Cetorelli and Gambera, 2001). Levine (2002) dan Beck

and Levine (2002) menunjukkan bahwa pengembangan sistem keuangan dan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan telah mempengaruhi tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini didukung oleh studi Collender and Shaffer (2003), yang menjelaskan hubungan positif antara struktur kelembagaan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi di negara-negara industri.

Restrukturisasi sektor keuangan dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* [1997] terdiri dalam empat program. *Pertama*, mengisolasi bank-bank yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya, tetapi untuk bank-bank yang masih dapat aktif dilaksanakan program rehabilitasi. *Kedua*, menentukan prosedur yang tepat dan pelaksanaan program rehabilitasi dengan tepat waktu. *Ketiga*, program pemecahan masalah khusus dari bank-bank pemerintah dan pembangunan daerah. *Keempat*, program perbaikan aspek kelembagaan, pengaturan kembali sistem operasi bank dan efisiensi sistem keuangan.

Tiga dari empat program di atas sudah berhasil dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi program keempat, yaitu program perbaikan aspek kelembagaan, pengaturan kembali sistem operasi bank dan efisiensi sistem keuangan, akan secara kontinu berjalan sesuai dengan aktifitas bank. Salah satu aktifitas bank yang paling penting adalah perantara keuangan, yaitu agen pembangunan yang mengkhususkan aktifitas transaksi beli aktiva dan jual hutang pada waktu yang sama dari kontrak keuangan dan sekuritas.

Lembaga keuangan bank sebagai agen pembangunan menghadapi masalah dalam perantara keuangan. Agen pembangunan yang mengkhususkan aktifitas perantara keuangan bank menghadapi tiga kendala utama, yaitu biaya transaksi, skala disekonomis dan diversifikasi disekonomis. Secara umum perantara keuangan bank menghadapi kendala biaya transaksi yang besar dalam monitoring dan audit. Perantara keuangan bank juga menghadapi kendala skala disekonomis, yaitu peningkatan biaya transaksi per unit akibat

peningkatan jumlah transaksi. Perantara keuangan bank juga menghadapi kendala diversifikasi disekonomis, yaitu peningkatan biaya transaksi per unit akibat peningkatan diversifikasi produk atau jasa yang dihasilkan.

Peranan perbankan sebenarnya dapat dilihat dengan jelas pada komitmennya dalam menyalurkan kredit di berbagai sektor ekonomi di daerah. Bilamana kredit yang disalurkan tumbuh dengan pertumbuhan yang tinggi, dapat dipastikan akselerasi peningkatan kegiatan ekonomi daerah akan mengalami pergerakan yang signifikan terutama dalam menciptakan iklim perekonomian daerah yang berpeluang menjanjikan meningkatnya pendapatan per kapita. Sebaliknya pertumbuhan kredit yang rendah akan mengakibatkan kegiatan ekonomi daerah berjalan pada jalur yang rendah dengan stimulasi ekonomi yang lemah. Kondisi ini tentu tidak positif bagi akselerasi pemulihan ekonomi daerah yang masih dilanda krisis ekonomi berkepanjangan.

Perubahan orientasi menuju ke arah penciptaan pasar bebas semakin kuat sejak diluncurkannya Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 88) dengan kebebasan pendirian bank-bank. Sejak Pakto 88 tersebut pertumbuhan bank, baik dari sisi jumlah bank, volume usaha, kredit yang diberikan maupun dana masyarakat yang dihimpun mengalami perkembangan yang pesat. Meluasnya pendirian kantor-kantor bank umum telah menghasilkan produk-produk pokok bank umum, yaitu giro, deposito, dan tabungan menjadi semakin luas. Peranan intermediasi keuangan dalam menyalurkan dana-dana dari surplus unit kegiatan-kegiatan usaha yang produktif atau defisit menjadi semakin berkembang.

Tabel 1
Jumlah Bank di Sumatera Utara, 2007

No.	Status Kepemilikan	Jumlah [Unit]	Jumlah Kantor Cabang [Unit]
1.	BUMN	4	43
2.	BPD	1	22
3.	Swasta Nasional	25	67
4.	Asing & campuran	3	7
5.	BPR	44	82
	Total	77	221

Sumber: Statistik Ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Desember 2008

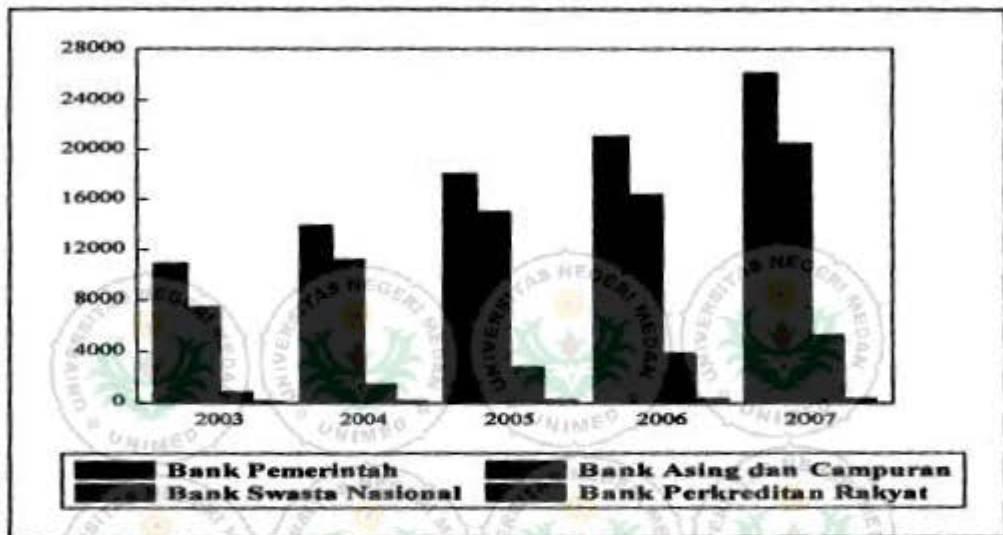
Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah bank yang beroperasi menjalankan fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 77 bank dengan jumlah kantor sebanyak 221 kantor.

Tabel 2
Posisi Penyaluran Kredit Menurut Kelompok Bank di Sumatera Utara [Milyar Rp]

Kelompok Bank	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Pemerintah	10928.3	13893.4	17972.0	21027.3	26139.9
Bank Swasta Nasional	7519.9	11189.3	14953.6	16312.8	20373.2
Bank Asing & Bank Campuran	834.6	1404.4	2735.5	3863.8	5333.1
Bank Perkreditan Rakyat	81.5	123.9	205.3	282.0	315.1
Total	19364.3	26611.0	35866.4	41485.9	52161.3

Sumber: Statistik Ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Utara, 2008.

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa posisi penyaluran kredit di Sumatera Utara mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Tahun 2004 terjadi peningkatan kredit sebesar 37.42 persen dari tahun 2003. Tahun 2005 meningkat sebesar 34.78 persen dari tahun 2004. Tahun 2006 meningkat sebesar 15.67 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 meningkat sebesar 25.73 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan untuk tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar 28.40 persen. Jika ditelusuri lebih lanjut, penyaluran kredit bank secara sektoral dapat menunjukkan sektor ekonomi yang paling besar menyerap kredit.



Gambar 1
Posisi Penyaluran Kredit Menurut Kelompok Bank

Tabel 3 menunjukkan bahwa penggunaan kredit sektoral meningkat setiap tahun baik per sektor maupun secara total. Sektor Pertanian menunjukkan peningkatan dalam penyerapan kredit perbankan untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 42.37 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik sebesar 38.58 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 24.32 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 naik sebesar 31.34 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor pertanian untuk tahun 2003-2007 sebesar 34.15 persen.

Tabel 3
Posisi Penggunaan Kredit Sektoral di Sumatera Utara, [Milyar Rp]

Sektor Ekonomi	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	2548.6	3628.5	5028.2	6251.0	8210.0
Pertambangan	19.2	152.6	11.0	25.2	15.9
Perindustrian	7000.2	7473.8	10081.0	11786.7	15128.6
Perdagangan	4283.0	6195.4	8886.7	9838.5	12032.4
Jasa-Jasa	2227.8	3495.0	4131.1	4842.6	5641.5
Lain-Lain	3285.4	5665.6	7728.4	8741.8	11132.8
Total	19364.3	26611.0	35866.4	41485.9	52161.2

Sumber: Statistik Ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Utara, 2008.

Sektor Pertambangan menunjukkan peningkatan dalam penyerapan kredit perbankan untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 694..79 persen dari tahun 2003, tahun 2005 menurun sebesar 92.79 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 129.09 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 menurun sebesar 36.91 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor pertambangan untuk tahun 2003-2007 sebesar 173.55 persen.

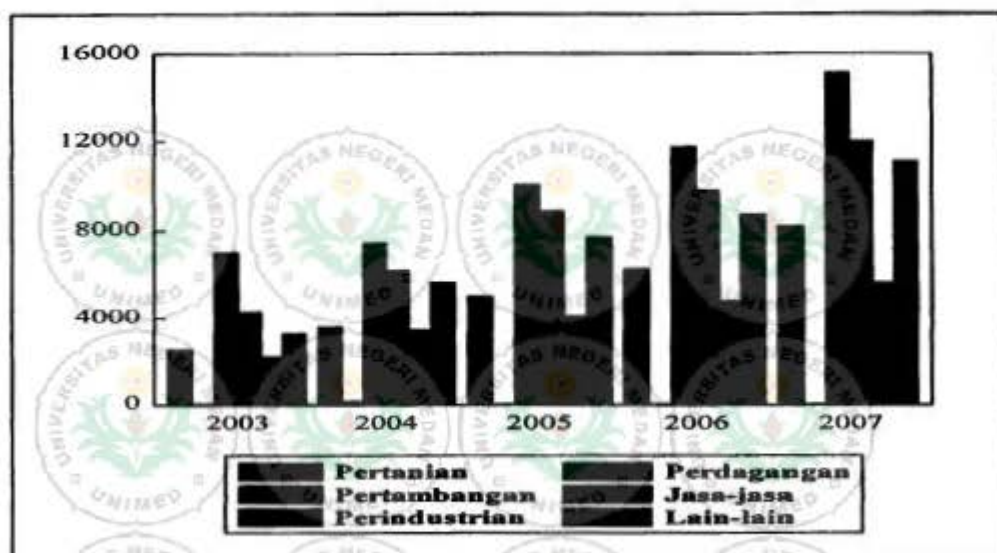
Sektor Perindustrian menunjukkan peningkatan dalam penyerapan kredit perbankan untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 6.77 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik sebesar 34.89 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 16.92 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 naik sebesar 28.35 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor perindustrian untuk tahun 2003-2007 sebesar 21.73 persen.

Sektor Perdagangan menunjukkan peningkatan dalam penyerapan kredit perbankan untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 44.65 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik sebesar 43.44 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 10.71 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 naik sebesar 22.30 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor perdagangan untuk tahun 2003-2007 sebesar 30.28 persen.

Sektor Jasa-jasa menunjukkan peningkatan dalam penyerapan kredit perbankan untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 56.88 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik sebesar 18.20 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 17.22 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 naik sebesar 16.50 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor jasa-jasa untuk tahun 2003-2007 sebesar 27.20 persen.

Sektor Lain-lain menunjukkan peningkatan dalam penyerapan kredit perbankan untuk setiap tahunnya, yaitu: tahun 2004 naik 72.45 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik sebesar 36.41 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 13.11 persen dari tahun

2005 dan tahun 2007 naik sebesar 27.35 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor lain-lain untuk tahun 2003-2007 sebesar 37.33 persen.



Gambar 2
Posisi Penyaluran Kredit Menurut Sektor Ekonomi

Peningkatan kredit sektor ekonomi untuk tahun 2003-2007 menunjukkan peningkatan. Tahun 2004 naik 37.42 persen dari tahun 2003, tahun 2005 naik sebesar 34.78 persen dari tahun 2004, tahun 2006 naik sebesar 15.67 persen dari tahun 2005 dan tahun 2007 naik sebesar 25.73 persen dari tahun 2006. Rata-rata peningkatan kredit sektor ekonomi untuk tahun 2003 – 2007 sebesar 28.40 persen.

Tabel 4
Tingkat Suku Bunga Kredit dan Suku Bunga Deposito [Persen]

Tahun	Bunga kredit	Bunga Deposito
2003	18.95	7.14
2004	17.14	6.66
2005	14.57	8.16
2006	14.73	9.71
2007	14.05	7.42
2008	15.22	7.79

Sumber: Statistik Ekonomi Daerah Propinsi Sumatera Utara, 2008.

Uraian diatas menunjukkan jumlah penyaluran kredit per sektor ekonomi, namun belum dapat menggambarkan tentang alokasi kredit sektoral secara optimal. Menurut Bank Indonesia Medan [2007], lembaga keuangan bank Provinsi Sumatera Utara menghasilkan rata-rata *loan to deposit ratio* (LDR) sebesar 68.27 persen. Jika giro wajib minimum (GWM) sebesar 2 persen, hal ini berarti lembaga keuangan bank hanya mampu menyalurkan kredit sebesar 68.27 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan sisanya sekitar 29.73 persen merupakan dana investasi pada aktiva bebas risiko. Besaran LDR ini mengindikasikan bahwa lembaga keuangan bank Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi kendala dalam fungsi intermediasi atau transformasi aktiva.

Lembaga keuangan bank akan lebih efisien jika secara simultan melayani pembukaan rekening deposit dan kredit atau pinjaman atau *economies of scope*. Jika lembaga keuangan bank meragukan debitur atau peminjam, sebaliknya deposan meragukan nilai proyek lembaga keuangan bank maka masalah informasi asimetris muncul. Hal ini akan mengakibatkan *adverse selection* dan *moral hazard*. Masalah *adverse selection* muncul sebelum transaksi kredit atau deposit terjadi, yaitu peningkatan permintaan kredit dari debitur dan peningkatan permintaan deposit dari lembaga keuangan akibat proyek investasi berisiko tinggi. Proyek berisiko tinggi mempunyai peluang gagal yang tinggi sehingga pengembalian kredit dari debitur atau pengembalian deposit dari lembaga keuangan bank gagal, atau masalah *moral hazard* muncul. Kedua masalah informasi asimetris ini mengakibatkan NPLs semakin tinggi.

Menurut Ramakrishnan and Thakor [1984], bentuk lain dari informasi asimetris adalah skala ekonomis. Pengumpulan informasi sebelum pembukaan rekening deposit dan kredit akan menekan biaya transaksi dan NPLs. Gorton and Pennacchi [1990] menekankan kualitas transformasi aktiva dari bank, pembiayaan investasi berisiko dengan deposit kurang

berisiko akan menekan masalah *adverse selection*. Penurunan masalah *adverse selection* ini akan menghasilkan biaya transaksi dan NPLs yang lebih rendah. Oleh sebab itu lembaga keuangan bank dalam aktifitas monitoring terdiri dari 3 (tiga) kegiatan [Hellwig, 1991], yaitu: menyaring proyek untuk mencegah *adverse selection*, mencegah perilaku oportunistik selama realisasi proyek, dan menghukum debitur yang gagal memenuhi kewajiban. Ketiga aktifitas monitoring ini akan dapat menekan biaya transaksi dan NPLs.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis alokasi kredit sektor ekonomi di Sumatera Utara. Untuk mengarahkan penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi alokasi pinjaman atau kredit sektor perbankan di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana elastisitas PDRB sektoral, tingkat bunga simpanan atau deposit, tingkat bunga pinjaman atau kredit dan jumlah kantor bank terhadap alokasi pinjaman atau kredit sektoral di Provinsi Sumatera Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian Analisis Alokasi Pinjaman Atau Kredit Sektor Perbankan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pinjaman atau kredit sektor perbankan di Sumatera Utara.
2. Menganalisis alokasi pinjaman atau kredit sektor perbankan yang paling dominan dan produktif di Sumatera Utara.